

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah pemerintahan adalah hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat manapun. Pemerintah adalah harapan dan kesempatan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan berdaulat dengan mengelola kebebasan dan kesetaraan yang dimiliki masyarakat. Di sisi lain, pemerintah merupakan tantangan dan hambatan bagi masyarakat terutama ketika pemerintah terjauhkan dari pengalaman moral pemerintah. Setiap masyarakat mempunyai keinginan dalam keberlangsungan hidup yang normal di segala bidang dan ukuran kehidupannya. Kebutuhan akan kehidupan yang normal tersebut menuntut pemerintah untuk menetapkan dan menegakkan hukum yang adil demi rasa keadilan bagi seluruh warga Negara. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sistem pemerintahan yang baik<sup>1</sup>.

Tata pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut sebagai *good governance* sudah lama menjadi mimpi banyak orang. Dalam perkembangan *good governance* sering dikaitkan sebagai bentuk kepentingan perusahaan saja. Pemahaman ini sedikit kurang tepat, sebab *good governance* merupakan instrumen yang bersifat umum dalam sebuah sistem organisasi<sup>2</sup>. Namun, meskipun pemahaman mengenai *good governance* berbeda-beda, pada intinya meraka membayangkan bahwa dengan adanya praktik pemerintahan yang lebih baik maka kualitas pelayanan publik akan semakin baik<sup>3</sup>.

*Good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Di Indonesia *good governance* mulai benar-benar

---

<sup>1</sup> Joko Setyono, 'Good Governance Dalam Prespektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)', *Jurnal Muqtasid*, Vol. 6, No (2015), 2.

<sup>2</sup> Zia Huzila, 'Adopsi Good Governance Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pondok Pesantren Annuqayah Lubangsa' (Universitas Wiraraja, 2019), 3.

<http://repository.wiraraja.ac.id/id/eprint/121>.

<sup>3</sup> Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Irwan, 2021), 1-2. <http://ugmpress.ugm.ac.id>.

dirintis dan diterapkan sejak era reformasi yang mana pada era tersebut telah terjadi perombakan dalam sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih. Sehingga *good governance* menjadi salah satu alat reformasi yang diterapkan dalam pemerintahan baru. Namun, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang telah berjalan lebih dari 20 tahun ini penerapan *good governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya.

Meskipun demikian konsep dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik telah dikembangkan di tingkat nasional, regional, dan internasional, sesuai dengan perbedaan masalah dalam hubungan di dalam lembaga pemerintah dan dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Saat ini, masalah yang paling mendesak dalam kaitannya dengan administrasi dapat ditemukan di tingkat nasional. Situasi tata kelola yang buruk masih ada, seperti korupsi, maladministrasi, dan salah urus<sup>4</sup>.

Selain itu, munculnya konsep *good governance* berasal dari ketidakpuasan terhadap aktivitas pemerintah sebagai pengatur urusan publik. Harus diakui bahwa pendekatan penyelenggaraan urusan publik bersifat sentralis dan non-partisipatif, serta tidak merespon kesejahteraan umum rezim-rezim sebelumnya, dan memancing ketidakpercayaan bahkan penolakan terhadap rezim yang berkuasa<sup>5</sup>.

*Good governance* merupakan bentuk kesepakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik agar dapat diciptakan secara bersama di berbagai elemen yang ada di suatu wilayah. *Good governance* ditingkat desa merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat diciptakan secara bersama oleh suatu pemerintahan desa, kelembagaan desa, serta kelembagaan lainnya yang ada di desa. Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik umumnya merujuk pada proses struktur kelembagaan yang ada di desa yang bertugas untuk membuat peraturan yang akan

---

<sup>4</sup> Henk Addink, *Good Governance Concept and Context* (United Kingdom: Oxford University Press, 2019), 15.

<sup>5</sup> Agus Miftakus Surur and Kharisma Nur Cholifah, 'Penerapan Good Governance Pada Kepengurusan Pondok Pesantren Putri Al-Amien', 9.2 (2018), 2.

digunakan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa.

Masyarakat Desa Surodadi mayoritas beragama Islam dengan komposisi terbanyak Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Hampir 95% dari jumlah penduduk mayoritas NU dan sisanya Muhammadiyah. Dengan komposisi penduduk demikian, Desa Surodadi didominasi oleh kelompok varian NU dengan berbagai kebiasaannya hingga menjadi sebuah budaya dalam masyarakat. Dalam musyawarah desa, aspirasi setiap masyarakat merupakan hal utama yang sangat penting. Tidak melihat dari kelompok mana masyarakat tersebut, suara mereka akan tetap diperhitungkan<sup>6</sup>.

Dewasa ini implementasi prinsip-prinsip *good governance* sangat diperlukan. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* sesuai prosedur yang tepat maka akan efektif digunakan untuk mencapai tujuan khususnya dalam kehidupan bermasyarakat<sup>7</sup>. Masyarakat merupakan sekelompok orang yang tinggal dan menetap dalam suatu wilayah.

Begitupun dengan pondok pesantren yang termasuk dalam salah satu kelompok masyarakat. Kompleksnya masalah global saat ini menuntut peran aktif santri untuk ikut berperan dalam mewujudkan *good governance*. Pada kajian ini santri menjadi titik kajian khususnya pada santri dari empat pondok pesantren di desa Surodadi yang terlibat aktif dalam pemerintahan desa.

Menurut Ayumardi Azra, pesantren mempunyai tiga peranan pokok fungsi kelembagaan. *Pertama*, institusi keilmuan. *Kedua*, institusi keagamaan. *Ketiga*, institusi sosial kemasyarakatan. Dalam keilmuan, pesantren cenderung mengutamakan penanaman ilmu daripada pengembangan ilmu. Hal ini dapat dilihat pada tradisi pendidikannya yang mengutamakan hafalan. Namun menurut Imam al-Ghazali, ilmu pengetahuan terbagi menjadi dua yaitu ilmu *syariah* yang

---

<sup>6</sup> Jacko Ryan, 'Pengaruh Dominasi Kelompok Santri Dalam Dinamika Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Wringinrejo Kabupaten Mojokerto)', 1 (2020), 91–102.

<sup>7</sup> Bayu Kharisma, 'Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan)', 9–30.

berhukum *fardhu 'ain* dan ilmu *ghoiru syariah* yang berhukum *fardhu kifayah*. Berdasarkan hal tersebut, pesantren termasuk dalam kategori ilmu *syariah* yang berhukum wajib untuk dipelajari. Meskipun demikian, dalam pengembangan keilmuan pesantren harus menggunakan yang berhukum *fardhu kifayah*<sup>8</sup>. Kemudian tradisi pesantren dalam prosesnya yang diharapkan dapat menciptakan perubahan sosial kearah yang lebih baik<sup>9</sup>. Dan yang terakhir dalam institusi sosial kemasyarakatan, pesantren hadir di tengah masyarakat yang memiliki keterkaitan dan keakraban dengan masyarakat.

Setiap pondok pesantren memiliki pengasuh, struktur kepengurusan, santri dan aturan yang harus dipatuhi. Selama ini pondok pesantren dianggap tertutup dari manajemen modern. Karena pada umumnya dalam kepemimpinan serta tata kelola di pesantren masih banyak bersifat alami dan tradisional. Hal tersebut dikarenakan pondok pesantren resistan dari praktik akuntabilitas sebab kuatnya pengaruh pemimpin dan tradisi didalamnya<sup>10</sup>.

Tradisi pesantren selain diajarkan mengaji dan mengkaji ilmu agama, para santri juga diajarkan untuk bertanggung jawab pada apa yang sudah dipelajari. Dalam pesantren diajarkan nilai-nilai kesederhanaan, keikhlasan, solidaritas, serta semangat dan kerjasama. Kesederhanaan menunjukkan pelepasan diri dari ikatan dan hirarki masyarakat setempat dan pencarian makna kehidupan yang terkandung dalam hubungan sosial secara mendalam. Keikhlasan adalah pengabdian tanpa memperhitungkan untung atau rugi sehingga akan tercipta suatu hubungan baik antar santri, santri dengan kiai serta santri dengan masyarakat. Selain itu, dari keikhlasan tersebut akan menjadikan santri sebagai pribadi yang pintar secara emosional, berbudi luhur, serta bertanggung jawab terhadap amanah yang akan diembannya. Solidaritas dan

---

<sup>8</sup> A Ja'far Khumaedi and Munawir, 'Good Corporate Governance Pada Lembaga Pendidikan Pesantren: Studi Pada Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia', *Jurnal Akademia*, Vol. 23, No. 1 (2018), 3.

<sup>9</sup> Zaini Tamin AR, 'Genealogi Peran Kaum Santri Dalam Sketsa Politik Nasional', *Jurnal Al-Ibroh*, Vol. 2, No (2017), 3.

<sup>10</sup> Wuna Fakhri Hakam, 'Analisis Penerapan Good Governance Pada Pondok Pesantren (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Tebuireng Jombang)' *Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang*, (2017), 1.

semangat kerjasama mewujudkan hasrat dalam melakukan perluasan pribadi kedalam suatu kelompok masyarakat dengan tujuan yang ikhlas mengejar hakikat kehidupan.

Keterlibatan santri dalam pemerintahan sama halnya dengan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan yang dapat memunculkan pengaruh timbal balik. Salah satunya dalam segi religio-kultural yang melekat pada kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia. Munculnya variasi religio-kultural tersebut karena di latarbelakangi oleh perbedaan golongan penduduk berdasarkan kekuasaan yang terdapat di desa-desa khususnya Jawa. Hal tersebut dapat terjadi karena terdapat pengaruh dari desa, pasar dan pemerintah selaku struktur sosial utama yang terdapat di desa<sup>11</sup>.

Di desa Surodadi agama masih memiliki pengaruh terhadap struktur pemerintahan. Keterlibatan dalam struktur pemerintahan desa dapat dilihat dari profil serta latar belakang dalam terpilihnya kepala Desa Surodadi. Faktor latar belakang Kepala Desa pada kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan menjadi salah satu alasan terpilihnya ia menjadi Kepala Desa. Faktor agama juga menjadi penting tidak hanya pada jabatan Kepala Desa namun juga pada semua jabatan struktural di Pemerintahan Desa. Dalam struktur pemerintahan desa Surodadi mayoritas berasal dari lulusan pondok pesantren yang ada di desa Surodadi. Bahkan ada beberapa kelompok masyarakat yang mensyaratkan ketua RT (Rukun Tetangga) ataupun ketua RW (Rukun Warga) diharuskan paham agama dan berasal dari lulusan pondok pesantren.

Penelitian ini menjadi penelitian yang khusus menjawab bagaimana peran santri dalam mewujudkan *good governance* di desa Surodadi. Berdasarkan dari paparan latar belakang di atas, mendasari penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **Peran Santri dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Surodadi, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara Tahun 2021.**

---

<sup>11</sup> Jacko Ryan, 'Pengaruh Dominasi Kelompok Santri Dalam Dinamika Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Wringinrejo Kabupaten Mojokerto)', 1 (2020), 91–102.

## B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini akan mengkaji tentang keterlibatan dan peran santri dalam mewujudkan *good governance* yang meliputi prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, supremasi hukum, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, *stakeholders*, efektif dan efisiensi, serta visi strategis. Adapun keterlibatan dan peran santri tersebut dianalisis dari empat pondok pesantren yaitu pondok pesantren Roisah, pondok pesantren Shabilul Hadi, pondok pesantren An Nur, dan pondok pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Aziz Atqa.

Dari empat pondok pesantren tersebut diambil sampel santri yang terlibat aktif dalam pemerintahan desa dengan menjadi aparatur desa maupun tokoh agama dan tokoh masyarakat. Penelitian dilakukan di desa Surodadi, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara pada Tahun 2021.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, terdapat beberapa pokok permasalahan yang mendasari ruang lingkup masalah yang akan diteliti, diantaranya:

1. Bagaimana implementasi *good governance* di Desa Surodadi?
2. Bagaimana peran santri dalam mewujudkan *good governance* di Desa Surodadi Kedung Jepara?

## D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi *good governance* di Desa Surodadi.
2. Mengetahui peran santri dalam mewujudkan *good governance* di Desa Surodadi Kedung Jepara.

## E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai peran santri dalam

kehidupan sekarang ini dilihat dari konteks politik dan pemerintahan.

- b. Mampu dijadikan sebagai bahan referensi terutama mengenai peran santri dalam mewujudkan *good governance*.
  - c. Mampu dijadikan sebagai rujukan penelitian sebagai pengembangan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis
- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang peran santri dalam mewujudkan *good governance* di desa Surodadi Kedung Jepara.
  - b. Bagi desa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan implementasi *good governance*.
  - c. Bagi pondok pesantren, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran santri dalam mewujudkan *good governance*.
  - d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan peran santri dalam mewujudkan *good governance*.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal skripsi, bagian isi skripsi yang terbagi dalam lima bab, dan bagian akhir skripsi. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa uraian subbab. Adapun pembagian tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Bagian Awal

Pada bagian awal terdiri dari sampul depan, sampul dalam, lembar pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi.

### 2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri atas tiga bab yang saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Ketiga bab tersebut adalah:

- BAB I : PENDAHULUAN**  
 Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II : KERANGKA TEORI**  
 Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Selain itu, dalam bab ini juga berisi Hasil Penelitian Terdahulu berupa jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti, serta Kerangka Berpikir.
- BAB III : METODE PENELITIAN**  
 Bab ini menjelaskan tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Tehnik Pengumpulan Data, serta Tehnik Analisis Data.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**  
 Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil dari penelitian dan pembahasan.
- BAB V : PENUTUP**  
 Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan dan dilanjutkan dengan saran-saran yang ditawarkan oleh penulis untuk menyelesaikan masalah penelitian.
3. Bagian Akhir  
 Pada bagian ini berisi daftar pustaka yang menjadi referensi dalam pemecahan masalah.